

TESIS

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN
PERJANJIAN KERJA LAUT DI
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**



Oleh

**MUHAMMAD ADNAN TIANOTAK
NIM.2320215310002**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA LAUT DI
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**MUHAMMAD ADNAN TIANOTAK
NIM.2320215310002**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**Judul Tesis : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Berdasarkan
Perjanjian Kerja Laut Di Pengadilan Hubungan Industrial**
Nama : Muhammad Adnan Tianotak
NIM : 2320215310002

**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**

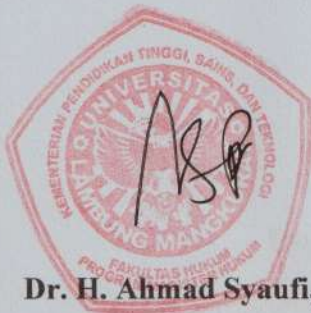


Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tangga Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 21 Juli 2025**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Laut mengajarkan kita bahwa arah dan tujuan hanya bisa dicapai dengan keberanian, kesabaran, dan keyakinan. Di tengah badai pun, nakhoda sejati tetap menjaga haluan.

Dengan izin Allah,

Aku telah menaklukkan ombak dan menempuh gelombang ilmu — karena pelaut bukan hanya penjelajah samudra, tapi juga pejuang masa depan.

PERSEMBAHAN :

Rekan-rekan pelaut di seluruh penjuru lautan, yang tak pernah berhenti berjuang dalam diam, melawan sunyi, dan menembus batas.

Semoga pencapaian ini menjadi bukti bahwa tidak ada batas bagi kita untuk bermimpi, belajar, dan bangkit — bahkan di tengah lautan sekalipun.

“JANGAN JEMU MENDAKI JIKA MAU KE PUNCAK CITA”

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Adnan Tianotak

NIM : 2320215310002

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banjarmasin, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Adnan Tianotak
NIM. 2320215310002

TIANOTAK, MUHAMMAD ADNAN 2025. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Di Pengadilan Hubungan Industrial. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** 125 halaman

RINGKASAN

Pasal 337 UU Pelayaran memiliki implikasi penting bagi awak kapal yang bekerja di kapal-kapal niaga dan pengusaha di sektor pelayaran, termasuk mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja, standar kerja, perlindungan tenaga kerja, serta penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Latar belakang masalah dari penelitian ini **Pertama**, sering muncul dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja pelaut adalah status awak kapal dalam kaitannya dengan *core business* perusahaan pelayaran serta hak mereka atas pesangon dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). **Kedua** persoalan yurisdiksi relatif dalam gugatan perselisihan hubungan industrial bagi pelaut sebagaimana ketentuan Pasal 81 UU PPHI, mengingat pekerjaan pelaut bersifat dinamis dan lintas wilayah, sering kali muncul perdebatan mengenai di mana gugatan harus diajukan. Beberapa pandangan menyatakan bahwa gugatan harus dilakukan di tempat di mana PKL ditandatangani, sementara pandangan lain menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan di tempat lain yang dianggap lebih relevan.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis status pelaut sebagai awak kapal dalam perspektif bisnis inti (*core business*) serta haknya atas pesangon dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengkaji yurisdiksi relatif dalam gugatan perselisihan hubungan industrial pelaut berdasarkan lokasi penandatanganan Perjanjian Kerja Laut. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat Preskriptif, dengan tipe Penelitian *reform oriented research* dengan pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa : **Pertama**, Perjanjian Kerja Laut menurut terminologi KUHDagang adalah sama dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sebagai pekerja bisnis inti (*core business*), Pelaut sebagai awak kapal juga berhak mendapatkan pesangon atas pemutusan hubungan kerja. **Kedua**, Meskipun aturan khusus pada Pasal 81 UU PPHI dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 pada pokoknya telah menyatakan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Awak Kapal yang didasari pada tempat PKL dibuat dan ditandatangani pada wilayah kantor kesyahbandaran pelabuhan atau di tempat terakhir pekerja itu bekerja, akan tetapi prinsip-prinsip umum tentang kewenangan relatif dalam Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBG tetap relevan dimana Pasal 81 UU PPHI tidak dapat diterapkan secara langsung karena kekhususan faktual mengingat sifat hubungan kerja pelaut yang unik dan sebagai pencegahan forum shopping oleh Pengusaha Pelayaran.

TIANOTAK, MUHAMMAD ADNAN 2025. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Di Pengadilan Hubungan Industrial. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** 125 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pelaut, Awak Kapal, Perjanjian Kerja Laut

Pasal 337 UU Pelayaran memiliki implikasi penting bagi awak kapal yang bekerja di kapal-kapal niaga dan pengusaha di sektor pelayaran, termasuk mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja, standar kerja, perlindungan tenaga kerja, serta penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja pelaut adalah status awak kapal dalam kaitannya dengan *core business* perusahaan pelayaran serta hak mereka atas pesangon dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, terdapat persoalan yurisdiksi relatif dalam gugatan perselisihan hubungan industrial bagi pelaut sebagaimana ketentuan Pasal 81 UU PPHI, mengingat pekerjaan pelaut bersifat dinamis dan lintas wilayah, sering kali muncul perdebatan mengenai di mana gugatan harus diajukan. Beberapa pandangan menyatakan bahwa gugatan harus dilakukan di tempat di mana PKL ditandatangani, sementara pandangan lain menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan di tempat lain yang dianggap lebih relevan.

TIANOTAK, ADNAN, MUHAMMAD 2025. Settlement of Employment Relations Disputes Based on Maritime Work Agreements in the Industrial Relations Court. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor : Dr. Saprudin, S.H., LL.M. 125 pages.

ABSTRACT

Keywords : Seafarers, Ship Crew, Maritime Work Agreement

Article 337 of the Shipping Law has important implications for seafarers working on merchant ships and employers in the shipping sector, including regarding the rights and obligations of workers, work standards, protection of workers, and the settlement of labor disputes.

One of the problems that often arises in the settlement of seafarers' employment disputes is the status of seafarers in relation to the core business of the shipping company and their rights to severance pay in the event of termination of employment (PHK).

In addition, there is a relative jurisdiction issue in industrial relations dispute lawsuits for seafarers as stipulated in Article 81 of the PPHI Law, considering that seafarers' work is dynamic and cross-regional, there is often debate about where the lawsuit should be filed. Some views state that the lawsuit must be filed at the place where the PKL was signed, while other views state that the lawsuit can be filed in another place that is considered more relevant.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umat manusia, khususnya umat Islam sehingga bisa merasakan nikmat Islam yang Insya Allah sampai dengan akhir hayat penulis.

Tesis yang berjudul **“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Laut Di Pengadilan Hubungan Industrial”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta atas doa yang tulus dan cinta kasih yang tak terhingga. Semoga pencapaian ini dapat sedikit membalas semua pengorbanan dan jerih payah kalian selama ini.
2. Keluarga kecilku tercinta dan tersayang atas doa, kesabaran, dukungan, pengertian semangat dan keceriaan yang selalu kalian berikan. Kalian adalah sumber kekuatan dan motivasi terbesar dalam hidup ini.
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam proses penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam penulisan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat selama Penulis mengikuti proses perkuliahan di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis sejak awal mengikuti studi sampai akhir penyelesaian studi ini.
8. Rekan-rekan Advokat pada Kantor Hukum Pandawa & Co Law Firm, Rumah Advokasi Pelaut Indonesia dan Para Senior Advokat lainnya, atas bantuan dan pengalaman-pengalaman berharga selama Penulis melakukan pekerjaan sebagai praktisi dalam dunia hukum.
9. Seluruh keluarga besar Pelaut Borneo Bersatu dan rekan-rekan pelaut dimanapun kalian berada, yang selalu memberikan dukungan dan semangat hingga Penulis bisa sampai ke titik ini. *“Pelaut hebat tidak lahir dari laut yang tenang.”*

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya bagi perkembangan hukum ketenagakerjaan dan hukum pelayaran di Indonesia.

Banjarmasin, 21 Juli 2025

Hormat Penulis,



MUHAMMAD ADNAN TIANOTAK

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian	22
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	31
BAB II HAK ATAS PESANGON BAGI AWAK KAPAL SEBAGAI PEKERJA BISNIS INTI (<i>CORE BUSINESS</i>)	32
A. Karakteristik Hubungan Kerja	32
B. Karakteristik <i>Core Business</i> di Indonesia	56
C. Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja	70
BAB III TEMPAT DIAJUKANNYA GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BAGI PELAUT SEBAGAI AWAK KAPAL	84
A. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial.....	84
B. Tempat Ditandatanganinya Perjanjian Kerja Laut sebagai Yurisdiksi Mutlak	97
C. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terkait Kewenangan Relatif Dalam Perkara Pelaut.....	111
BAB IV PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	